

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- LKPP. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP.
- LKPP. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP.
- LKPP. (2021). Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP.
- LKPP. (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta: LKPP.
- Pusat Pengembangan Profesi Keinsinyuran PII. (2022). Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Keinsinyuran. Jakarta: Persatuan Insinyur Indonesia.
- Riyanto, Wahyu. (2022). Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/21>
- LKPP. (2025). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP.
- LKPP. (2025). Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi. Jakarta: LKPP.
- LKPP (2025) *Portal Pengadaan Nasional*. Available at: <https://www.lkpp.go.id> (Accessed: 30 Oktober 2025).